



JURNAL SETIA PANCASILA

Vol 3 No. 1 September 2022, pp. 22-38

e-ISSN: 2745-7451

Available online at :

<https://e-jurnal.stkipgrisumenep.ac.id/index.php/JSP>

THE STRUGGLE OF RELIGIOUS CONSERVATISM AND TERRORISM: CHALLENGES TO INDONESIA'S ISLAMIC MODERATION

Shohebul Umam¹

¹shohebul.umamjr@gmail.com

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Informasi Artikel

Received: 1-08-2022

Revised 7-08-2022

Accepted 20-08-2022

Keywords(bold italic):

***Religious Conservatism,
Terrorism, Islamic
Moderation***

ABSTRACT

Abstract. *The multidimensional crisis caused by the Covid-19 pandemic has pushed for the strengthening of Islamic conservatism, which is one way that makes it easier for terrorism to enter and develop in society. In the midst of a conservative society towards religion, terrorist groups circulate the narrative of Covid-19 as an 'end of time' condition that must be faced with militant jihad, and has proven to be effective in the recruitment process, propaganda, to be effective in mobilizing emotions to carry out acts of terror. The method used is qualitative with a literature study approach through collecting data on reports and literature from previous research results, as well as online news. This study has identified that terrorist groups have successfully adapted to the conditions of the Covid-19 pandemic, and made the pandemic a new issue and inspiration in recruiting, propaganda, and terrorizing acts. Therefore, government agencies related to terrorism prevention must be able to develop strategies that are adaptive to this new situation, where so far the approach to counter terrorism has so far been ad hoc. Therefore, the deradicalization policy is not only realized in the form of reorientation and resocialization, but is also encouraged to build counter narratives with terrorism groups in implanting radical ideologies, through new steps, collaborating with mainstream mass organizations such as NU and Muhammadiyah in building a narrative of Islamic moderation, both culturally and through new internet channels.*

PERGUMULAN KONSERVATISME AGAMA DAN TERORISME: TANTANGAN TERHADAP MODERASI ISLAM INDONESIA

ABSTRAK

Keywords (bold,
italic):
Konservatisme agama,
Terorisme, Moderasi
Islam

Abstrak: Krisis multidimensional yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19, mendorong terhadap menguatnya konservatisme Islam, yakni satu jalan yang mempermudah terorisme masuk dan berkembang di masyarakat. Di tengah masyarakat yang konservatif terhadap agama, kelompok teroris mengedarkan narasi Covid-19 sebagai kondisi 'akhir zaman' yang harus dihadapi dengan jihad militant, dan terbukti efektif dalam proses rekrutmen, propaganda, hingga efektif dalam menggerakkan emosi untuk melakukan aksi-aksi teror. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengumpulan data terhadap laporan dan literatur hasil penelitian sebelumnya, serta berita online. Studi ini berhasil mengidentifikasi bahwa, kelompok teroris berhasil beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19, dan menjadikan pandemi sebagai isu dan inspirasi baru di dalam melakukan rekrutmen, propaganda, hingga aksi-aksi teror. Oleh karena itu, instansi pemerintah terkait pencegahan terorisme harus dapat membangun strategi yang adaptatif dengan situasi baru ini, di mana sejauh ini pendekatan penanggulangan terorisme sejauh ini masih bersifat ad hoc. Maka dari itu, kebijakan deradikalisasi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk reorientasi dan resosialisasi, tetapi juga didorong untuk membangun kontra narasi dengan kelompok-kelompok terorisme di dalam menancapkan ideologi radikal, melalui langkah-langkah baru, berkolaborasi dengan ormas-ormas mainstream seperti NU dan Muhammadiyah dalam membangun narasi moderasi Islam, baik secara kultural ataupun melalui kanal-kanal baru interne

PENDAHULUAN

multidimensional di Indoensia. Corona Virus bukan hanya tentang krisis kesehatan yang telah memakan jutaan korban, tetapi sekaligus menyebabkan kerentanan di dalam sektor ketahanan dan keamanan negara (Aulia Oktami Putri, 2020). Angka kriminalitas di masa pandemi cenderung semakin meningkat tajam sejak kali pertama pandemi mulai menyebar di Indonesia. Pada minggu ke-19 Covid-19 meledak di Indonesia, angka kriminalitas berjumlah 3.481, dan meningkat drastis pada minggu ke-20 dengan angka mencapai 3.726 kasus (Izza Aliyatul Millah, 2020). Akumulasi kriminalitas ini bermacam-macam, mulai dari kejahatan di jalanan, pencurian, hingga kejahatan cyber dan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa, aktivitas terorisme meningkat drastis di masa pandemi melalui internet, mulai dari propaganda, rekrutmen, hingga pendanaan dilakukan secara virtual (Izza Aliyatul Millah, 2020). Dalam situasi ini, kelompok-kelompok teroris berhasil beradaptasi secara baik dengan perubahan sosial karena pandemi.

Internet menjadi medium utama yang memudahkan teroris di dalam melakukan doktrinasi ke dalam semua dimensi masyarakat, khususnya kepada pemuda untuk mendukung ideologi mereka. Bak gayung bersambut, pemuda Indonesia sangat lekat dengan internet dan memiliki kecenderungan mencari informasi agama dari internet. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Syarif Hidayatullah mencatat siswa/mahasiswa yang mencari informasi agama melalui internet maupun media sosial sekitar 50,89%, dan generasi milenial bergantung pada internet 84,94%, dan 96.20% siswa/mahasiswa memiliki akses internet, 61.05% mengakses internet untuk mencari informasi agama, pola ini selalu meningkat setiap tahunnya. (Dirga Maulana, 2018) Kecendrungan ini meningkat setiap tahun, terlebih di masa pandemi, di mana realitas sosial terpaksa harus berubah menjadi realitas virtual karena kebijakan

social distancing (PPKM), mobilitas sosial digantikan menjadi mobilitas virtual, masyarakat menjadi lebih cenderung lebih dekat dengan teknologi, mulai dari aktivitas edukatif, politik, hingga hal-hal rekreatif. Melalui situasi ini kemudian, kelompok-kelompok teroris mengembangkan narasinya melalui jaringan ultra, dengan menyebut wabah Covid-19 sebagai bentuk alarm dunia akan segera berakhir, disebarkan secara massif ke dalam jaringan internet. Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri mengatakan bahwa, kelompok teroris menggunakan Covid-19 sebagai wacana untuk mendorong anggotanya agar melakukan teror, dengan menyebut pandemi Covid-19 adalah keadaan akhir zaman (CNN, 2021).

Melalui wacana akhir zaman, kelompok teroris memotivasi anggotanya untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan itu dengan jalan berjihad. Seperti kasus-kasus di Kendal, Maluku, Brebes, dan Sulawesi Tenggara baru-baru ini yang kedapatan merakit bom bunuh diri dalam mempersiapkan untuk aksi teror. (CNN, 2021) Sebagai leading sector penanggulangan terorisme, Densus 88 menjadi aktor super sibuk, terlebih sebelumnya ditemukan aliran dana oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencapai 4.093 yang diduga berasal dari kelompok teroris dalam kurun waktu lima tahun terakhir. (CNN, 2021) Fakta ini didukung oleh temuan BNPT, di mana selama pandemi tercatat terdapat kenaikan 101 persen transaksi mencurigakan dan mengarah pada kelompok teroris (CNN, "BNPT, 2021).

Pandemi Covid-19 oleh karena itu, telah menjadi jalan baru dan memudahkan langkah propaganda teroris di dalam mengedarkan kepentingannya. Situasi yang penuh dengan ketidakpastian, penuh gangguan di dalam setiap jengkal kehidupan, serta krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi, dimanfaatkan oleh teroris untuk menyebarkan ketakutan dan kebencian untuk meradikalisasi anggota dan target calon anggota (Pinilih Waluyo Jati, 2021).

Dalam konteks ini, tampak bahwa jaringan terorisme, baik Al Qaeda ataupun ISIS, telah beradaptasi dengan konteks baru, yang semakin menegaskan eksistensi mereka, baik offline ataupun melalui situs-situs baru di internet. Melalui jaringan internet, teroris memupuk kebencian kepada negara, dengan mengedarkan wacana ketidakadilan dan wacana konspirasi transnasional yang tidak bisa dibuktikan. Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 oleh karena itu, harus bersifat multidimensional pula. Krisis kesehatan tidak boleh menghabiskan tenaga negara, sehingga lupa pada sektor yang lain, terutama ancaman di sektor keamanan. Oleh karena itu, negara harus melibatkan semua unsur pemerintahannya, mulai dari kementerian kesehatan, sosial, serta institusi-institusi pertahanan seperti TNI, Polri, dan Badan Inteljen Negara, harus bersinergi menjawab tantangan ini. Selain itu, negara harus mengambil langkah untuk bersinergi dengan ormas-ormas mainstream seperti NU dan Muhammadiyah agar narasi wabah dalam perspektif agama berimbang. Khususnya di media sosial yang selama ini dikuasai oleh narasi kelompok-kelompok teroris (Maulana).

Wabah Covid-19 oleh karena itu, menjadi momentum paling akbar terorisme untuk memupuk kekecewaan masyarakat kepada pemerintah, dan hal ini menjadi sangat rentan semasekali. Merespon situasi ini, tulisan ini akan membahas tentang: motif-motif gerakan terorisme melakukan propaganda di masa pandemi, bagaimana terorisme membongkar wacana Covid-19 sebagai kondisi akhir zaman, dan upaya penanggulangan gerakan terorisme di masa pandemi melalui langkah-langkah baru yang inovatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yang mengumpulkan berbagai data informasi dari buku dan hasil penelitian sebelumnya (Mestika Zed, 2004). Teknik studi kepustakaan ini meliputi, pengumpulan data

melalui telaah atas buku dan jurnal, catatan dan berbagai laporan yang sesuai dengan masalah penelitian (Dr Conny R, 2010). Objek kajian ini adalah kelompok gerakan terorisme di masa pandemi yang melakukan upaya propaganda rekrutmen dan mendorong aksi radikal melalui wacana Covid-19 sebagai kondisi akhir zaman. Rentetan analisis yang dilakukan adalah, mencari data, mereduksi data, menyajikan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: jurnal, buku/e-book, laporan elektronik, 3 berita online terorisme di masa pandemi covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1) Ancaman Terorisme di Masa Pandemi

Covid-19 telah meningkatkan konservatisme agama, sekaligus memberi jalan baru bagi terorisme di Indonesia. Pasca merebaknya Covid-19 pada awal Maret 2020 lalu, pemerintah telah melakukan langkah-langkah preventif dan represif di dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus dan dampaknya. Mulai dari *social distancing*, *lockdown*, upaya-upaya represif seperti *tracing* menjadi ikhwal untuk menekan Covid-19 oleh pemerintah (Darmin Tuwu, 2020). Dalam upaya menekan virus mematikan ini, pemerintah tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan saja, akan tetapi menyertakan lembaga-lembaga keamanan seperti Polri, TNI hingga BIN, untuk menelusuri sebaran cepat dari setiap *cluster* (Roni Sulistyanto Luhukay, 2010). Kebijakan ini merupakan langkah penting yang diambil oleh pemerintah, mengingat bahwa dampak penyebaran Covid-19 bersifat multidimensional, dan patut untuk disikapi secara komprehensif, mulai dari dampak terhadap kesehatan, politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan dan ketahanan negara.

Sebelumnya, pelibatan BIN ke dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, tidak diakui secara formal, seperti tertuang di dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, yang hanya melibatkan BNPB (Badan Nasional

Penanganan Bencana), Polri dan TNI. Tetapi kemudian kebijakan ini direvisi pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan sebelumnya dengan menyertakan BIN ke dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Andhi Bahtiar, 2020). Keputusan ini terbilang langkah yang tepat, mengingat di dalam perkembangannya, wabah Covid-19 ditunggangi oleh banyak kepentingan, termasuk kepentingan propaganda kelompok-kelompok teroris yang menggunakan narasi pandemi. Kehadiran BIN ke dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, memberikan dampak signifikan di dalam melakukan tindakan cegah dini (*pre-emptif*) dan peringatan dini terhadap setiap ancaman.

Keterlibatan BIN ke dalam penanganan Covid-19 berhasil membongkar kelompok-kelompok teroris yang menggunakan wabah Covid-19 sebagai wacana gerakan. Kelompok-kelompok radikal terbukti telah beradaptasi dengan situasi krisis kesehatan dunia saat ini, di mana di negara Indonesia berhasil diungkap bahwa, kelompok-kelompok teroris di beberapa daerah tengah mempersiapkan diri melakukan aksi teror. Dalam situasi yang serba tidak pasti di dalam wabah, menyokong terorisme melenggang dengan mudah di dalam mengedarkan ideologinya, sembari memupuk ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah (Sukawarsini Djelantik, 2010). Krisis kesehatan yang menyebabkan banyak masalah di setiap sektor seperti, pengangguran karena PHK, ekonomi yang semakin melemah (Wibowo Hadiwardoyo, 2020), menjadi situasi yang memudahkan seseorang bertindak di luar pikiran positifnya. Pada saat yang sama, narasi kebencian dan propaganda kelompok-kelompok teroris membangun gairah seseorang di tengah keterhimpitan karena krisis untuk melakukan tindakan-tindakan reaktif dan ekstrim.

Ketika seseorang telah merasa putus asa dan bosan dengan keadaan diri dan lingkungannya, efektif mendorong keputusan untuk bergabung dengan gerakan mesianistik

terorisme yang menjanjikan surga dan kehidupan yang lebih nyaman yang bersifat apokaliptis di masa depan. Peran media massa yang sangat dekat dengan masyarakat modern saat ini, memudahkan terorisme berinfiltrasi secara ultra dan massif (Eska Nia Sarinastiti, 2018). Polri dalam hal ini, telah menemukan bahwa, media massa yang semakin mudah diakses melalui jaringan internet yang serba cepat, berpengaruh sangat besar terhadap aksi kejahatan, di mana media massa menjadi media refrensi dan menambah informasi bagi seseorang untuk melakukan aksi kejahatan, terutama bagi pelaku pemula (Millah). Oleh karena itu, framing kebencian oleh kelompok teroris di masa pandemi Covid-19, terbukti efektif di dalam menggerakkan simpatisan untuk melakukan aksi teror.

Melalui jaringan internet, kegiatan propaganda, rekrutmen dan pendanaan aksi teror menjadi lebih mudah dilakukan, dan sulit terdeteksi oleh pemerintah. Seperti kasus-kasus di Kendal, Maluku, Brebes, dan Sulawesi Tenggara baru-baru ini yang kedapatan merakit bom bunuh diri dalam mempersiapkan untuk aksi teror, (CNN, "Polri) termakan oleh propaganda akhir zaman kelompok teroris. Selain itu, penangkapan satu orang teroris di Cirebon pada Juni 2020 oleh Densus 88 ditengarai berafiliasi dengan JAD (Jamaah Ansharut Daulah), empat bulan kemudian yakni, pada Oktober 2020, empat orang teroris berhasil dibekuk di Bekasi Jawa Barat, di tahun berikutnya, Mei 2021, 13 teroris berhasil diamankan Densus 88 di Merauke dan termasuk dari anggota JAD, setelah itu pada November 2021 3 orang teroris berhasil diringkus di Jawa Timur (Ajeng Wirachmi, 2021). Keberhasilan Densus 88 meringkus pelaku teror dari sabang sampai Merauke ini, bukanlah suatu hal yang mesti dibanggakan, karena fakta ini sekaligus menggambarkan bahwa langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah seperti deradikalisasi, tidak berjalan dengan rapi, bahkan masih terlalu jauh untuk dibanggakan.

2) Negara, Terorisme dan Pandemi

Konflik di tengah pandemi Covid-19 menjadi semakin mudah meledak. Tindakan aparaturnya yang tidak jarang cenderung represif kepada masyarakat di tengah pandemi, (KontraS, 2021) menjadi tindakan 'awas' yang diklaim sebagai simbol ketidakberpihakan negara kepada rakyat. (Sarah Safira Aulianisa, 2020). Konflik di tengah pandemi oleh karena itu dapat dibagi menjadi dua varian: *pertama*, konflik vertical, yakni konflik yang melibatkan antara masyarakat dengan negara atau unsur-unsur pemerintah dengan semua bentuk aparaturnya. Seperti misalnya konflik yang terjadi antara pekerja di sektor informal dengan aparat keamanan, di mana sekitar 60% atau sekitar 70 juta jiwa orang Indonesia bekerja di sektor ini, khusus sebagai pedagang kaki lima, tukang becak, ojek online dan konvensional, asisten rumah tangga dan lain sebagainya (Sahat Maruli Situmeang, 2021). Kenyataan ini berpotensi menyumbang dilema di saat pandemi, sekaligus memberikan celah bagi kelompok-kelompok teroris mengembangkan isu tentang seputar ketidakadilan, kezaliman pemerintah, untuk memupuk rasa kecewa masyarakat kepada negara.

Ke dua, konflik horizontal yakni, tipe konflik yang terjadi antara masyarakat yang didasarkan pada dua asumsi: *pertama*, kebijakan pencegahan dan mitigasi Covid-19 yang banyak bertumpu pada pembatasan sosial yang berdampak besar pada stabilitas ekonomi, khususnya ekonomi masyarakat kelas bawah, dan memaksa mereka untuk melakukan tindakan kejahatan, terlebih kebijakan pemerintah terkait pembebasan lebih dari 30.000 narapidana yang mendapatkan asimilasi sebagai bentuk pencegahan dan penanganan Covid-19. *Ke dua*, serangan terorisme di tengah krisis multidimensional, memecah fokus pemerintah dan aparaturnya dalam mencegah Covid-19. Kelompok teroris melihat ruang yang cukup longgar untuk melakukan aksi serangan, akibat sumber daya negara habis dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19.

Keadaan yang tidak menentu di tengah pandemi Covid-19, menjadi arena baru bagi teroris untuk melakukan aksi-aksi teror. Kebijakan pemerintah yang banyak diperdebatkan di ruang publik, terkait kebijakan pembatasan sosial, dan ekspresi aparaturnya yang cenderung represif kepada masyarakat kecil, banyak dipantulkan sebagai pendongkrak kekecewaan masyarakat kepada negara. Penggiringan opini tentang Covid-19 sebagai kondisi akhir zaman yang penuh ketidakadilan (CNN, "Polri."), didasarkan pada fakta-fakta tentang sikap negara yang cenderung tidak proporsional dalam menyikapi persoalan di tengah masyarakat. Seperti misalnya, pedagang kaki lima yang mendapat hukuman denda 5 juta karena melanggar peraturan pencegahan dan penanganan Covid-19, sementara di sisi yang lain, salah seorang pejabat hanya didenda 48 ribu dengan pelanggaran yang sama (Indozone, 2021). Selain itu, banyak pelaku tindak pidana korupsi tidak diadili dan mendapatkan remisi karena alasan kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19. Kenyataan ini memudahkan masyarakat merasa kecewa kepada negara, dan pada saat yang sama propaganda terorisme yang menyusup secara ultra dan massif, menggerakkan mereka untuk melakukan aksi teror. Oleh karena itu, negara dan pihak yang berkaitan dengan penanganan terorisme harus beradaptasi dengan situasi baru ini di dalam menyusun langkah strategis untuk melawan gempuran terorisme.

Selama ini langkah penanganan tindakan terorisme dilakukan melalui strategi preemtif, preventif dan represif. Strategi ini diimplementasikan dengan cara pengkondisian terhadap masyarakat umum untuk membangun kepekaan masyarakat terhadap kejanggalan yang dapat mengganggu Kamtibmas; meyakinkan bahaya terorisme kepada seluruh elemen masyarakat; kontra radikalisme terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi mengarah pada terorisme; implementasi deradikalisasi kepada kelompok militan, baik kader teroris ataupun *ex teroris*, untuk

menumbuhkan kesadaran bahwa tindakan teror tidak berprikemanusiaan dan merugikan banyak orang; melakukan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak seperti masyarakat, santri, pelajar, mahasiswa, baik secara kelompok ataupun individual dalam rangka untuk melakukan upaya diteksi dini, identifikasi masalah, dan tindakan represif jika diperlukan. (Jati, Mulyadi,) Akan tetapi sejauh ini, strategi ini tidak terbukti mampu mencegah tindakan terorisme, bahkan kasus bom bunuh diri di Jawa Tengah seperti kasus di Solo yang terjadi di sekitar Mapolresta, di Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya, menampilkan bahwa Polri dan BIN seolah kehilangan diteksi dan pelaku teror melenggang dengan nyaman untuk melakukan aksinya. Pada posisi ini, langkah-langkah untuk melawan terorisme seperti yang sudah dilakukan oleh negara, tampak tidak efektif dan tidak progresif, dengan melihat fakta aksi-aksi teror bahkan terjadi di lingkungan Polri. Kejadian ini mendeskripsikan bahwa, langkah-langkah pre-emptif, preventif Polri tidak berjalan dengan baik dan terukur.

Ali Fauzi mengatakan bahwa, ada dua faktor yang dapat mendorong teroris keluar dari jalan jihad militannya yaitu: *pertama, push factor*, yakni dorongan dari dalam untuk keluar. Dorongan dari dalam ini timbul karena beberapa hal terkait dengan internal kelompok teroris seperti misalnya, kekecewaan atas pemimpin, metode atau ideologi yang menjadi landasan dianggap tidak relevan dengan arah perjuangan dan lain sebagainya (Ihsan Ali Fauzi, 2018). *Ke dua, pull factor* yakni tarikan dari luar yang membuat persepsi diri berjalan ke arah yang positif, misalnya dilatar belakangi oleh pertimbangan mengenai masa depan, karir, kalkulasi tentang tantangan yang dihadapi dari pemerintah, persaingan, lawan dan lain sebagainya (Ihsan Ali Fauzi, 2018). Hal-hal sederhana dan mendasar seperti ini penting untuk dicacah di dalam penanggulangan ancaman terorisme oleh pihak yang berwajib, untuk menyeret keluar aktor-aktor radikal keluar dari jaringannya. Penguatan narasi akhir zaman oleh teroris di tengah Covid-19

yang sulit dilawan, bahkan oleh semua negara dan kepala pemerintahan di penjuru dunia, menjadi pendulum yang efektif menggerakkan ketertarikan masyarakat pada kelompok-kelompok teroris, dengan menggerakkan rasa kecewa masyarakat teroris dengan sporadis dapat melakukan rekrutmen besar di masa pandemi ini.

Oleh sebab itu, secara historis gerakan terorisme yang bergeliat di Indonesia sejak pasca kemerdekaan dan berkembang pasca tersungkurnya Soeharto dan Orde Barunya 1998 (Ahmad Asrori, 2015), terus bertumbuh melakukan langkah-langkah baru di dalam mengkontestasikan ideologi dan gerakan teror yang semakin sulit dikendalikan. Fakta historis ini, menjadi sebuah penanda bahwa, gerakan Islam radikal hingga terorisme di Indonesia dilatarbelakangi oleh dinamika politik yang dianggap tidak menguntungkan bagi kelompok-kelompok tertentu. Hasan melihat bahwa, tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kekecewaan beberapa kelompok masyarakat terhadap pemerintah (Hasan). Sel-sel gerakan Islam radikal ini dimulai dari sejak munculnya Darul Islam (DI) di bawah Kartosoewirjo 1940-1962 sampai terbentuknya JI oleh Abdullah Sungkar 1993, dibentuk oleh akumulasi kekecewaan yang kompleks (Solahudin). Pangkal persoalannya adalah, selain kelompok terorisme semakin mahir mengelola psikologi dan emosi seseorang, sehingga regenerasi pelaku teror terus berkembang, terlebih di tengah pandemi, rekrutmen dan propaganda semakin mudah digiring melalui isu-isu pandemi, kemampuan negara untuk merespon gerakan terorisme juga masih tidak rapi.

Berangkat dari kajian teoritis ini kemudian, Polri dan BNPT serta semua unsur yang terkait dengan pencegahan terorisme, harus menemukan strategi baru di dalam menantang tindakan teror. Pada saat yang sama, serangan teror di masa pandemi Covid-19 menunjukkan pola dan tipe yang berbeda di dalam melakukan serangan. Situasi ini

belum teridentifikasi langkah terukur yang dilakukan oleh pihak terkait. Gempuran terorisme di masa pandemi Covid-19 oleh karena itu, mesti dijawab dengan strategi yang bersifat kolektif dan tidak hanya melibatkan unsur-unsur keamanan negara, tetapi juga elemen *grass root*. Menurut Jati, langkah-langkah strategi kolektif melawan terorisme di situasi pandemi ini dapat diimplementasikan dengan langkah-langkah berikut: (Jati, Mulyadi, and Mamoto, "Strategi Polri dalam Penanggulangan Terorisme di Masa Pandemi Covid-19.")

a. Strategi meliteristik

Strategi ini harus dibangun di atas perencanaan yang matang dan SOP yang jelas dalam melakukan langkah-langkah penanganan dengan mengutamakan gerakan *silent*, meliputi:

- 1) Memburu setiap oknum atau kelompok yang membantu gerakan terorisme dengan hukuman efek jera.
- 2) Setiap oknum atau kelompok yang membantu terorisme dikeringkan sumber keuangannya.

b. Optimalisasi pertahanan keamanan di dunia siber

Dunia siber menjadi arena pertarungan yang mesti disadari penting untuk diatur lebih ketat. Polri, TNI dan BNPT harus merencanakan sistem patroli siber untuk memutus mata rantai gerakan terorisme di dunia siber yang terbukti efektif di dalam masa pandemi melakukan propaganda, rekrutmen dan motivasi aksi teror. Patroli siber harus menempatkan ekspertis yang mumpuni di dalam memahami mode terorisme di dunia siber, agar bisa mengimbangi laju framing isu dan membangun kontra narasi yang dibangun oleh teroris.

c. Meningkatkan kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial masyarakat, meliputi kesejahteraan ekonomi, kesehatan, hukum, politik, beragama, budaya dan hak kebebasan berekspresi masyarakat harus dijamin oleh pemerintah. Melalui peningkatan kesejahteraan sosial, masyarakat tidak akan

mudah terjebak ke dalam bujuk rayu dan narasi epik terorisme.

d. Membangun instrumen yang kuat dalam mencegah terorisme

Salah satu instrument pencegahan gerakan terorisme di Indonesia tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagai landasan utama penanganan masalah terorisme. Sejauh ini regulasi yang digunakan untuk menjawab tantangan ini meliputi strategi:

1) Penegakan hukum

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tindakan terorisme merupakan tindakan yang masuk kategori criminal, dengan landasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.

2) Membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Badan ini merupakan pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang lahir pada tahun 2002. BNPT dibentuk sebagai sebuah regulasi untuk mengelaborasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang mengatur tugas lebih rinci tugas TNI selain operasi perang, termasuk pelibatannya di dalam mencegah terorisme.

Jadi, dalam kajian ini menunjukkan langkah-langkah penanganan terorisme secara terstruktur dan rapi. Akan tetapi, perspektif ini nyaris sudah diimplementasikan oleh pemerintah. akan tetapi pada kenyataannya, pendekatan

hukum dan struktur kelembagaan yang berkaitan dengan *leading sector* penangan teror, tidak mampu meminimalisir aksi-aksi teror. Hal mendasar yang dilupakan oleh Jati, bahkan negara, adalah kultur di dalam lembaga penanganan anti-teror itu sendiri, baik di lingkungan Polri ataupun BNPT yang masih terlalu *ad hoc*. Oleh sebab itu, wacana deradikalisasi yang dicanangkan oleh pemerintah, tidak menyentuh semua dimensi persoalan, karena sistemnya hanya bertendensi pada pendekatan militeristik, tidak ada tukar tambah pikiran menumbuhkan *critical discours*.

3) Arah Baru Penanggulangan Terorisme: Tantangan Terhadap Moderasi Islam Indonesia

Wacana deradikalisasi menjadi narasi panjang pemerintah yang pada kenyataannya tidak terindikasi dapat menurunkan potensi ancaman terorisme. Deradikalisasi dipahami sebagai bentuk upaya untuk melawan dan meruntuhkan ideologi terorisme (Muh Khamdan, 2015). Tujuan kebijakan ini tidak lain adalah untuk mengubah pelaku teror yang sebelumnya berideologi radikal menjadi tidak radikal atau menjunjung paham moderat. Kegiatan-kegiatan deradikalisasi diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti reorientasi motivasi, resosialisasi, reedukasi, mengupayakan kesejahteraan dan kesetaraan sosial di dalam masyarakat bagi pelaku yang terlibat aksi teror. (Jati, Mulyadi,) Akan tetapi pada kenyataannya, kelompok-kelompok terorisme tidak sedikitpun menurunkan tensinya untuk melakukan tindakan teror sejauh ini. Bahkan beberapa kasus terjadi di tengah pandemi Covid-19.

Kebijakan deradikalisasi dengan program-program implementasinya sejauh ini tidak menunjukkan tingkat keberhasilan yang maksimal di dalam mencegah paham radikal berinfiltrasi ke dalam relung paling subtil masyarakat. Dalam situasi pandemi Covid-19, kebijakan deradikalisasi tampak tidak berjalan secara efektif, bahkan terkesan tidak proyektif. Salah satu kendalanya adalah, program deradikalisasi tidak mampu mengimbangi narasi radikal kelompok-

kelompok terorisme. Hasilnya adalah, program reedukasi dan reorientasi yang dicanangkan pemerintah untuk menggembosi paham radikal, masih jauh panggang dari api. Oleh sebab itu, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam penanggulangan terorisme, harus dapat mengkontekstualisasikan dan dapat menangkap perubahan zaman dengan utuh di dalam merespon gerakan terorisme, di mana teknologi informasi yang semakin massif, menjadi media episentrum yang dapat mengucapkan segala bentuk sikap, tindakan, hingga kebijakan negara.

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam upaya mengimplementasikan wacana deradikalisasi, harus bersinergi untuk membangun narasi inklusif, toleransi, dan sikap nasionalisme yang kuat dan diartikulasikan ke dalam setiap lembaga-lembaga negara, khususnya ke dalam lembaga pendidikan, BNPT, hingga Polri. Seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi Muslim, harus dapat memahami integrasi agama dan negara dari sejak dini, untuk menginternalisasikan Islam Indonesia yang moderat. Selain itu pemerintah harus menguatkan narasi keagamaan-kebangsaan di ruang publik dengan mendorong tokoh dan ormas keagamaan, untuk bersama-sama menghalau tindakan yang mengarah pada eksklusifisme, fundamentalisme hingga terorisme, seperti yang dilakukan oleh AS (Todd C., Erin York, 2013). Misalnya menggandeng ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah untuk melakukan gerakan dakwah secara online, dengan memproduksi konten kontra narasi dengan gerakan khilafah di internet dengan cara yang kreatif-populer. Sejauh ini ormas agama tidak memiliki kesadaran tentang pentingnya mengedukasi umat melalui jaringan internet, seperti website, youtube, platform, instagram, twitter, facebook dan lain sebagainya.

Seperti telah disampaikan di atas, kajian terhadap pola kebergantungan masyarakat terhadap teknologi di era ini, sangat besar samasekali, PPIM Syarif Hidayatullah dalam survey 2017 menemukan siswa/mahasiswa yang mencari informasi

agama melalui internet maupun media sosial sekitar 50,89%, dan generasi milenial bergantung pada internet 84,94%, dan 96,20% siswa/mahasiswa memiliki akses internet, 61,05% mengakses internet untuk mencari informasi agama, pola ini selalu meningkat setiap tahunnya. (Maulana) Artinya, internet adalah kanal baru yang efektif untuk membentuk pikiran, tindakan, dan perilaku seseorang. Sementara yang menguasai media sosial dan website adalah kelompok-kelompok Islam eksklusif dan intoleran yang anti-pancasila.

Sekali lagi, keadaan ini tidak terlepas dari langkah intervensi penanganan tindakan anti-pancasila masih terlalu bersifat *ad hoc*. Terutama langkah penanganan yang bergerak di wilayah media sosial. Tidak ada kejelasan pasti, siapa yang menjadi *leading sector*, antara BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) atau Kemenkominfo. (Maulana) Implikasinya adalah, kanal-kanal internet tidak mendapat perhatian optimal dari negara, sehingga meninggalkan lubang yang sangat besar bagi ideologi radikal untuk berinfiltrasi secara massif. Selain itu, negara tidak mendorong kelompok-kelompok *extra parlemantary* seperti ormas-ormas tradisional, NU dan Muhammadiyah, untuk membangun narasi moderasi Islam di seluruh dimensi masyarakat, baik secara kultural ataupun melalui kanal-kanal internet.

Pada akhirnya, ormas seperti NU dan Muhammadiyah hanya fokus pada persoalan internalnya saja, netral (tidak mendukung atau menolak) pada gerakan anti-pancasila. (Maulana) Padahal otoritas keagamaan *mainstream* (NU-Muhammadiyah), memiliki kemampuan untuk memberikan narasi yang moderat tentang agama Islam. Akan tetapi sejauh ini, gerakan ormas keagamaan *mainstream* masih cenderung kultural. Sehingga narasi antara Islam moderat dan Islam intoleran menjadi tidak berimbang samasekali. Suatu hal yang mengakibatkan anak-anak muda lebih banyak mengkonsumsi informasi dan narasi Islam Kaffah yang tidak memperdulikan kebinekaan bangsa Indonesia yang niscaya.

Kebijakan deradikalisasi oleh karena itu, harus dapat diartikulasikan dengan baik oleh pemerintah. Seperti misalnya, membangun sinergi dengan ormas-ormas *mainstream* seperti NU dan Muhammadiyah, untuk membangun kontra narasi dengan terorisme dengan kekuatan legitimasi atas pengetahuan Islam yang kokoh dapat menautkan Islam dan Pancasila sebagai ideologi negara. (Syaiful Arif, 2018) Otoritas keagamaan NU dan Muhammadiyah yang berlandaskan moderasi Islam, dapat membangun *counter* opini, dan keabsahannya sulit untuk ditentang oleh masyarakat, karena legitimasi otoritas keagamaan ormas-ormas ini tidak dapat diragukan juntrung sanadnya. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong ormas-ormas *mainstream* seperti NU dan Muhammadiyah untuk terlibat di dalam program-program deradikalisasi yang sejauh ini tidak mendapatkan ruang dari pemerintah, dan pada akhirnya ormas-ormas ini bersikap netral (tidak mendukung atau menolak) terhadap aksi-aksi teror. Keterlibatan ormas-ormas *mainstream* ini di dalam pencegahan terorisme di masa pandemi, dapat meluruskan narasi wabah yang digunakan oleh kelompok-kelompok teroris di dalam melakukan propaganda, rekrutmen dan aksi teror.

Keterlibatan ormas-ormas *mainstream*, didorong oleh negara untuk membangun kritisisme bangsa, agar masyarakat dapat membatalkan ideologi radikal sekaligus aksi-aksi teror lebih dini. Sejalan ini, masyarakat Indonesia, tampak tidak memiliki kritisisme yang kuat, seolah-olah setiap informasi, setiap narasi, adalah suatu kebenaran, tidak perlu dikomplementasi ataupun dikoreksi. Oleh sebab itu, agar bangsa ini tidak terlalu jauh lebur menjadi masyarakat *post factum* yang kering kritisisme, maka narasi moderasi Islam harus didudukkan sebagai isu utama bangsa, untuk membangun nalar kritis masyarakat di tengah narasi radikalisme yang dilemparkan melalui narasi hoaks yang semakin sporadis.

B. Pembahasan

1) Konservatisme Agama dan Terorisme

Jika dilihat dari rentang waktu menguatnya konservatisme Islam pasca Reformasi, maka tahun 2014, yakni setelah Jokowi menjadi pemenang kontestasi pemilihan presiden kontra Prabowo Subianto, menjadi tahun di mana para ahli memandang bertumbuhnya Muslim konservatif di Indonesia, sekaligus mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang konservatif secara keagamaan. (Yanwar Pribadi, 2021) Situasi ini semakin diperparah oleh aksi-aksi jalanan pada tahun 2016-2017 oleh beberapa kelompok Islam garis keras, yang terjadi karena panasnya atmosfer kompetisi politik lokal Jakarta, yang berhasil melempar Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dari kursi kekuasaan, karena isu-isu agama yang tidak dapat dikondisikan dengan baik (Irfan Prayogi, 2019). Reaksi keras masyarakat Muslim Indonesia terhadap pidato Ahok yang dianggap telah melecehkan Al-Quran, tidak hanya menjadi peristiwa keagamaan, tetapi juga menjadi episode buruk politik Indonesia karena mengetengahkan isu-isu agama sebagai komoditas politik. (AN Burhani, 2016: 18) Selain itu, menguatnya konservatisme agama terus berjalan di tengah Pandemi Covid-19, bahkan seolah tampak semakin mengeras. Tidak sedikit pemuka agama konservatif yang anti-sains, menolak percaya terhadap sebaran virus yang mematikan ini, termasuk menolak terhadap sistem penanganan oleh pemerintah yang berbasis sains.

Menguatnya konservatisme agama (Islam), berdampak buruk terhadap dinamika kehidupan masyarakat dalam semua sektor. Dalam ranah sosial-politik, keharmonisan masyarakat yang multikultural menjadi retak samasekali. Agama menjadi salah satu variabel paling kompleks di negara Indonesia, dan dalam sepuluh tahun terakhir di perkenalkan kepada politik yakni melalui politik identitas berbau agama, sehingga menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai toleransi dan pluralisme (Marcus Mietzner, 2020). Politik identitas oleh karena itu, menjadi penyokong utama menguatnya

konservatisme agama masyarakat Indonesia saat ini. Maka sebab itu, konservatisme agama menggiring tantangan yang kuat kepada Indonesia sebagai negara yang multi-agama karena berdampak buruk pada politik, sosial, ekonomi, kesehatan dan budaya masyarakat.

Sementara itu, dalam ranah sebaran Covid-19 dan penanganannya, sikap konservatif beberapa pemuka agama di tengah masyarakat, memberikan beban signifikan terhadap pemerintah di dalam upaya melakukan keputusan mata rantai penyebaran Covid-19. Bagi masyarakat konservatif-fanatis terhadap agama, tokoh agama yang dianggap memiliki legitimasi terhadap ajaran dan prinsip-prinsip Islam, merupakan figure utama yang dapat membimbing dan menentukan arah hidup mereka, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Oleh sebab itu, tokoh agama yang konservatif memiliki otoritas yang sangat kuat dan dapat menentukan sikap dan tindakan masyarakat. Kondisi ini secara *de facto*, membatasi terhadap kemampuan pemerintah di dalam upaya menangani virus global ini, karena harus berhadapan dengan sikap dan keyakinan masyarakat yang konservatif. (Marcus Mietzner, 2020)

Dalam konteks konservatisme agama, Bruinessen kemudian mengambil istilah *Conservative Turn in Indonesia*, yakni satu istilah yang berusaha dijadikan sebagai gambaran sosiologis keagamaan masyarakat Indonesia yang kembali pada bentuk awalnya yakni, konservatif. (Martin Van Bruinessen, 2011). Keadaan ini terus mendorong semakin merosotnya pluralisme di Indonesia, semakin melemahkan nilai-nilai toleransi, sekaligus membuka peluang besar terhadap masuknya ideologi-ideologi radikal dan terorisme (Atini Baidah, 2022). Kekhawatiran ini terbukti, di tengah mencekamnya situasi sosial karena gempuran Covid-19 menghukum masyarakat dengan krisis lintas sektor, terorisme menyelinap masuk memanfaatkan isu-isu krusial Covid-19 untuk menumbuhkan narasi 'akhir zaman' di tengah masyarakat, (CNN, "Polri.") di mana pemerintah atau negara

ditempatkan sebagai 'kambing hitam' yang telah mendorong kerusakan pada dunia.

Kembalinya konservatisme agama memberikan jalan lapang bagi masuknya terorisme dan ideologi-ideologi radikal di tengah masyarakat. Menguatnya konservatisme agama di dalam publik, merupakan akibat logis dari tidak bertumbuh seimbang pandangan atau intelektualisme Islam liberal progresif. Wahid melihat bahwa, ketidakmampuan intelektual Muslim untuk membangun narasi Islam liberal yang progresif, selain memudahkan demokratisasi negara, juga berakibat buruk terhadap tidak seimbang intelektualisme yang mendorong terhadap konservatisme agama semakin menguat. (Din Wahid, 2014).

Ketika konservatisme agama semakin menguat, dan tidak ada nalar kritis yang bertumbuh sebagai upaya untuk mengimbangi nalar intelektualitas konservatisme Islam, maka terorisme akan menjadi suatu gerakan yang akan semakin nyaman melakukan rekrutmen, propaganda, hingga teror. Terlebih ketika Pandemi Covid-19, menjadi momentum tepat dan sangat mendukung untuk membangun idiom-idiom tunggal 'membela agama', 'jihad', dan lain sebagainya. Di tengah krisis yang sangat buruk, di mana keputusan semakin mudah menggumpal, kecemasan selalu bertambah tinggi, akan memberikan siksaan yang telak terhadap psikologis seseorang (Saifudin Asrori, 2019). Sehingga nalar menjadi tidak kritis, semakin mudah terjebak ke dalam gerakan mesianistik terorisme, yang dengan lalai membangun mimpi-mimpi keindahan di akhirat, dengan melawan kedzalaman yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada konteks ini kemudian, terorisme harus dapat dipahami sebagai sebuah paham dan gerakan kekecewaan beberapa kelompok militant, terutama kekecewaan kepada negara dan bentuk kebijakannya. Narasi tentang hukum Islam sebagai solusi terakhir untuk menumbuhkan kesejahteraan dan keadilan dalam suatu negara, menjadi ujung pangkal historisitas gerakan kelompok-kelompok Islam militant di Indonesia. Mulai dari Negara Islam Indonesia (NII), hingga

terbentuknya kelompok Jamaah Islamiyah (JI), Darul Islam (DI), Jamaah Anshorut Daulah (JAD), memiliki narasi yang sama yakni, mengganti sistem demokrasi yang diyakini sebagai sistem *thogut* dan telah menyebabkan kedzaliman dan ketidakadilan (Solahudin, 2011). Oleh sebab itu, terorisme tidak bisa dilepaskan dari kepentingan sektoral, atau dapat disebut sebagai gerakan politik.

Dalam hal ini, Hasan dalam salah satu karya magnum opusnya *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post New Order in Indonesia* melihat bahwa, kelompok-kelompok Islam militant di Indonesia, tidak bisa hanya dipandang sebagai gerakan agama, tetapi lebih dari itu, kelompok-kelompok Islam militan di Indonesia merupakan gerakan ekonomi-politik yang tidak hanya terbatas pada dimensi regional tetapi juga transnasional. (Noorhaidi Hasan, 2006). Terutama sejak runtuhnya jangkar politik Orde Baru Soeharto pada tahun 1998, kelompok-kelompok Islam militant kembali menemukan arena untuk mempertontonkan ideologi dan kesempatan politik, di tengah perubahan sistem otoritarianisme ke demokrasi, dari sentralisme ke desentralisasi, meningkatkan suara lantang kelompok-kelompok masyarakat, terutama Islam Politik, menghayati demokrasi dengan cara yang cenderung *kebablasan* (Noorhaidi Hasan, 2008).

Etape tumbuh dan menyebarnya gerakan-gerakan intoleransi hingga terorisme di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa politik nasional hingga global. Istilah teror dan terorisme mulai menjadi kata yang mengerikan setelah peristiwa mengerikan terhadap menara kembar di Amerika Serikat, *World Trade Center* (WTC) pada 11 September 2001, (Samsuri Samsuri, 2016). Sedangkan di Indonesia, ledakan bom dahsyat di Legian, Bali pada 2002, dan menisbatkan para pelaku teror itu termotivasi oleh agama, dan terafiliasi dengan Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah, (Samsuri Samsuri, 2016). Berangkat dari peristiwa ini maka, terorisme

dan gerakan-gerakan intoleransi atas nama agama, tidak dapat dilepaskan samasekali dengan dinamika politik, baik dimensi politik lokal, nasional, ataupun global.

2) Islam *Wasathiyah*

Konservatisme agama, intoleransi agama, radikalisme, hingga terorisme, dan istilah-istilah sepadan lainnya, merupakan prinsip-prinsip yang mengerikan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Qodir dalam telaahnya tentang terorisme melihat bahwa, Indonesia disinyalir oleh dunia sebagai gembong teroris di Asia Tenggara, karena tidak sedikit para pelaku teror yang menjadi incaran keamanan dunia bersembunyi di Indonesia. (Zuly Qodir, 2012). Fakta ini merupakan pukulan telak dan membuat 'gerah', karena pada sisi yang lain Indonesia terus mempromosikan Islam Moderat, sebagai jalan baru untuk menghalau terorisme.

Stigma bangsa teroris, tentu merusak harga diri bangsa di tingkat global dan mencoreng muka umat Muslim Indonesia. Oleh sebab itu, mengedepankan diskursus *Islam Wasathiyah* atau Islam Moderat menjadi jalan baru untuk menghalau gerakan-gerakan terorisme, sekaligus melemparkan nilai baru bangsa Indonesia ke dalam ikatan global, di mana pada kenyataannya problem terorisme merupakan beban dunia. *Wasathiyah* merupakan ajaran Islam yang berisi tentang prinsip-prinsip, nilai-nilai dasar tentang pikiran, sikap, karakter, dan tindakan seseorang agar seimbang, adil, proporsional, *maslahah*, atau juga sering disebut moderat (Khairan M. Arif, 2020). Pada dasarnya, konsep Moderasi Islam bukanlah suatu hal yang baru muncul di abad ke-14 hijriyah atau abad ke-20 ini, akan tetapi sejak 14 abad yang silam yakni, setelah Islam muncul di permukaan bumi melalui Nabi Muhammad, telah ada dan ditekankan sebagai nilai fundamental yang harus dikedepankan untuk menjaga keadilan.

Kembalinya konservatisme agama di Indonesia, membuka jalan berinfilasinya ideologi radikal semakin mudah. Banyak

penelitian yang telah dilakukan terkait keberagamaan masyarakat Indonesia, dan notabene menyimpulkan masyarakat mulai dari yang terbawah sampai di tingkat paling atas, atau dari remaja atau pelajar sampai para pendidik, terpapar oleh ideologi radikal dan mendukung terhadap gerakan teror yang dilakukan oleh ISIS. (Muhd. Darraz Abdullah, 2018). Selain itu, beberapa penelitian lainnya menunjukkan bahwa sikap dan kegairahan masyarakat terhadap agama saat ini semakin meningkat, fenomena pengajian di perkantoran, di tempat perbelanjaan seperti mall, semakin banyak diminati, sehingga *fashion* dan arena ekonomi lainnya dilabeli *halal* untuk mendongkrak penjualan, bahkan pariwisata di beberapa daerah ditempele embel-embel *syari'ah* (Amanah Nurish, 2019). Kegairahan masyarakat terhadap agama pada satu sisi, membawa dampak positif yakni menghidupkan moralitas semakin tangguh. Akan tetapi di sisi yang lain, kegairahan masyarakat terhadap agama membawa insinuasikan yang mengkhawatirkan karena sekaligus menghidupkan konservatisme hingga intoleransi agama. Bahkan yang terburuk adalah keterjebakan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok radikal intoleran dan terorisme.

Ulama Islam modern oleh sebab itu, menyadari dan memiliki kekhawatiran terhadap terjadinya benturan antara arus ekstrim kanan dan arus ekstrim kiri akan mengancam terhadap peradaban Islam. Oleh sebab itu, *Wasathiyah Islam* menjadi alternatif yang terus dilemparkan ke dalam diskursus Islam hari-hari ini oleh para ulama moderat. Semangat ini untuk menjaga nilai-nilai keadilan, dengan mengusung konsep Islam tengah, sebagai jalan baru yang diyakini dapat mengejawantahkan antara yang sakral dan yang profan.

Secara leksikal, *Wasathiyah Islam* dapat diartikan sebagai Islam Tengah. Kata *wasat* bersal dari bahasa Arab yang bermakna '*pertengahan*' (Ahmad Dimiyati, 2017). Dalam konteks aktivitas sehari-hari kata *wasath* merujuk pada sikap atau tindakan yang berada di tengah-tengah antara sikap berlebihan (*guluw*), dan kurang (*qasr*), dalam

ranah batas-batas aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. (Ahmad Dimiyati, 2017). Jika dipahami dari terminologi ini kemudian, tampak bahwa posisi tengah yang dimaksudkan tidak hanya sekadar antara dua sisi paham radikal atau liberal, akan tetapi moderasi Islam merupakan suatu metode atau kerangka berpikir yang memiliki implikasi secara etik sebagai frame perbuatan tertentu (M. Basir Syam, 2018). Penggunaan kata 'tengah' adalah sebuah resolusi berpikir yang inklusif, dan tidak sepenuhnya menolak pandangan yang lain dalam konteks tertentu. Maka konsep Islam Tengah secara implisit, berlawanan secara diametral dengan sikap ekstrim pada satu sisi dan liberal pada sisi yang lainnya.

Moderatisme Islam oleh karena itu, memiliki orientasi yang tidak jauh berbeda dengan konsep Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia (Umi Kulsum, 2020). Moderasi Islam merupakan jalan yang menginterasikan serta menginterkoneksi antara kepentingan negara seperti ekonomi, politik, sosial, dengan kepentingan-kepentingan moralitas yang terberi di dalam agama dan norma-norma yang berbeda di dalam masyarakat heterogen. Pada wilayah ini kemudian tampak bahwa, konfigurasi konsep Moderasi Islam dan Pancasila secara substansial berusaha untuk mengucapkan bahwa, multikulturalisme sebagai suatu keniscayaan bangsa Indonesia, menjadi pondasi utama untuk memperkuat *ukhuwah*, memperkokoh kebersamaan di tengah perbedaan (Rusdin Ahmad, 2017). Islah Moderat oleh karena itu, menjadi peta pikir untuk menerjemahkan intoleransi beragama ke dalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga masyarakat tidak terjebak pada pertengkaran panjang dua kutub pemikiran utama yakni, antara kutub ekstrim pada satu sisi, dan kutub liberal pada sisi yang lainnya.

SIMPULAN

Kiprah Perempuan tani dalam Pandemi Covid-19, tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan *an sich*, tetapi secara telak

menyebabkan krisis multidimensional meliputi krisis ekonomi, identitas, hingga krisis keamanan. Wabah Virus Corona menjadi isu baru yang dibangun oleh kelompok-kelompok teroris untuk melakukan propaganda, rekrutmen, hingga aksi teror. Narasi wabah sebagai kondisi akhir zaman, terbukti efektif menggerakkan anggota teroris untuk melakukan aksi-aksi teror. Oleh karena itu, negara melalui instansi terkait, harus juga bisa beradaptasi dengan situasi baru di dalam menangkal gempuran terorisme ini. Kebijakan dan regulasi untuk pencegahan terorisme oleh karena itu, harus disesuaikan dengan situasi pandemi, di mana program deradikalisasi tidak cukup hanya dengan mengedepankan program reorientasi dan reedukasi, tetapi juga bersinergi dengan ormas-ormas *mainstream* untuk menegosiasikan otoritas keagamaannya di dalam membangun kontra narasi dengan kelompok-kelompok teroris di masa pandemi, dengan mengoptimalkan moderasi Islam di kanal-kanal internet, seraya tidak meninggalkan gerakan kultural.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Fauzi, Ihsan, and Dyah Kartika Ayu. *Kelur Dari Ekstremisme: Delapan Kisah "Hijrah" Dari Kekerasan Menuju Binadama*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), 2018.
- Arif, Syaiful. *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Djelantik, Sukawarsini. *TERORISME: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. New York, NY: SEAP Publications, 2006.
- . "State, Religion, and the Dynamics of Transition: Reportair of Violence Is Post-Seoharto Indonesia." In *Religious*

- Diversity and Civil Society A Comparative Analysis. Oxford: Bardwell Press, 2008.
- Semiawan, Prof Dr Conny R. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Zed, Mestika. Metode peneletian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Internet**
- Abdullah, Muhd. Darraz, and Zuly Qodir. "Osiris Mendayung Di Antara Dua Karang: Kebijakan Sekolah, Radikalisme Dan Inklusivisme Kebangsaan." MAARIF Institute for Culture and Humanity 1, no. 4 (2018).
- Ahmad, Rusdin. "Demokrasi Dan Multi Kulturalisme Dalam Kontestasi Dakwah Islam." Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi 13, no. 1 (July 15, 2017): 1–30.
- Arif, Khairan M. "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, as-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha." Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam 11, no. 1 (January 8, 2020): 22–43. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>.
- Asrori, Ahmad. "Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas." KALAM 9, no. 2 (December 30, 2015): 253–68. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>.
- Asrori, Saifudin. "Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme Dan Ekstremisme Di Indonesia." Aqlam: Journal of Islam and Plurality 4, no. 1 (July 10, 2019). <https://doi.org/10.30984/ajip.v4i1.911>.
- Aulianisa, Sarah Safira, and Athira Hana Aprilia. "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?" Padjadjaran Law Review 7, no. 2 (2020): 26–37.
- Bahtiar, Andhi, and Adis Munandar Imam. "Narrative Policy Framework (NPF) Analysis Terhadap Pelibatan Intelijen Negara Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia." Jurnal Keamanan Nasional Volume 6, no. 2 (2020).
- Baidah, Atini, Budi Juliandi, and Marhaban Marhaban. "Politik Dan Konservatisme Islam Indonesia Dan Tunisia." PROCEEDINGS ICIS 2021 1, no. 1 (January 3, 2022). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/icis/article/view/12691>.
- Bruinessen, Martin Van. "What Happened to the Smiling Face of Indonesian Islam? Muslim Intellectualism and the Conservative Turn in Post-Suharto Indonesia." RSIS Working Paper, 2011. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=conservative+turn+indonesia&oq=conservative+turn.
- Burhani, AN. "Aksi Bela Islam: Konservatisme Dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan." MAARIF Institute for Culture and Humanity 11, no. 2 (2016).
- C., Todd, Erin York, and Peter Chalk. "Promoting Online Voices for Countering Violent Extremism." RAND CORP SANTA MONICA CA, January 1, 2013. <https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA580832>.
- CNN. "BNPT: Propaganda Dan Pendanaan Teroris Meningkatkan Saat Pandemi." nasional, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210702101348-12-662165/bnpt-propaganda-dan-pendanaan-teroris-meningkat-saat-pandemi>.
- CNN, C. N. N. "Polri: Teroris Narasikan Pandemi Sebagai Akhir Zaman." nasional, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831201608-20-688041/polri-teroris-narasikan-pandemi-sebagai-akhir-zaman>.
- Dimiyati, Ahmad. "ISLAM WASATHIYAH." Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman 6, no. 2 (2017): 139–68.

- <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v6i2.167>.
- Djelantik, Sukawarsini. *TERORISME: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Hadiwardoyo, Wibowo. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship* 2, no. 2 (April 23, 2020): 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>.
- Indozone. "Pejabat Langgar PPKM, Vonisnya Hanya Rp48 Ribu & Rp500 Ribu, Tapi PKL Didenda Jutaan." [indozone.id](https://www.indozone.id/news/3esv3vx/pejabat-langgar-ppkm-vonisnyahanya-rp48-ribu-rp500-ribu-tapi-pkl-didenda-jutaan), 2021. <https://www.indozone.id/news/3esv3vx/pejabat-langgar-ppkm-vonisnyahanya-rp48-ribu-rp500-ribu-tapi-pkl-didenda-jutaan>.
- Jati, Pinilih Waluyo, Mulyadi, and Benny Jozua Mamoto. "Strategi Polri dalam Penanggulangan Terorisme di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 1 (July 6, 2021): 13.
- Khamdan, Muh. "Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme." *ADDIN* 9, no. 1 (2015): 25.
- "KontraS: Polisi Semakin Represif Di Tengah Pandemi Covid-19." Accessed September 2, 2021. <https://www.suara.com/news/2021/06/30/215601/kontras-polisi-semakin-represif-di-tengah-pandemi-covid-19>.
- Kulsum, Umi. "Konstelasi Islam Wasathiyah Dan Pancasila Serta Urgensinya Dalam Bernegara Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (April 30, 2020): 51–59. <https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1493>.
- Luhukay, Roni Sulistyanto, and Hartanto Hartanto. "Urgensi Penerapan Local Lockdown Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesatuan." *ADIL Indonesia Journal* 2, no. 2 (July 30, 2020). <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/AIJ/article/view/624>.
- Maulana, Dirga. "Situs-Situs Islam; Kontestasi Narasi Radikal Dan Moderat." *Convey Report (PPIM UIN Jakarta-UNDP Indonesia)* 1, no. 3 (2018).
- Mietzner, Marcus. "Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism." *Democratization* 27, no. 6 (August 17, 2020): 1021–36. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>.
- . "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 2 (August 1, 2020): 227–49. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>.
- Millah, Izza Aliyatul. "Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (August 30, 2020): 497–513. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28099>.
- Nurish, Amanah. "Dari Fanatisme Ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, September 1, 2019, 31–40. <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1.829>.
- Oktami Putri, Aulia. "Aktualisasi Nyata Bela Negara Saat Pandemi Covid-19 (Real Actualization of the State Defense When the Covid-19 Pandemy)." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, April 19, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3580876>.
- Prayogi, Irfan. "Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (July 29, 2019): 31–43. <https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1083>.

- Pribadi, Yanwar. "Kebangkitan Konservatisme Islam: Politik Identitas dan Potret Demokrasi di Indonesia." *Studia Islamika* 28, no. 2 (August 19, 2021): 457–71.
<https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.22204>.
- Qodir, Zuly. "Peran Negara Dan Agama Dalam Memerangi Terorisme." *Jurnal Orientasi Baru* 21, no. 1 (2012): 93–108.
- Samsuri, Samsuri. "Terorisme Agama?" *Millah: Jurnal Studi Agama* 2, no. 2 (December 14, 2016): 307–12.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol2.is2.art12>.
- Sarinastiti, Eska Nia, and Nabilla Kusuma Vardhani. "Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism New Media." *Jurnal Gama Societa* 1, no. 1 (March 20, 2018): 40–52.
<https://doi.org/10.22146/jgs.34048>.
- Situmeang, Sahat Maruli. "Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 19, no. 1 (April 29, 2021): 35–43.
<https://doi.org/10.34010/miu.v19i1.5067>.
- Solahudin. *NII Sampai Ji; Salafy Jihadisme Di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.
- Syam, M. Basir. "Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Sosiologi." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 4, no. 2 (December 31, 2018): 197–213.
<https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i2.7302>.
- Tuwu, Darmin. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *Journal Publicuho* 3, no. 2 (2020).
- Wahid, Din. "Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia." *Studia Islamika* 21, no. 2 (August 31, 2014): 375–90.
<https://doi.org/10.15408/sdi.v21i2.1043>.
- Wirachmi, Ajeng. "Daftar Penangkapan Teroris Yang Dilakukan Selama Pandemi, Dari Bekasi Hingga Merauke." <https://nasional.okezone.com/>, November 16, 2021.
<https://nasional.okezone.com/read/2021/11/16/337/2502721/daftar-penangkapan-teroris-yang-dilakukan-selama-pandemi-dari-bekasi-hingga-merauke>.